

Bab I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan hidup Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Lingkungan Hidup yang disiapkan satu tahun sebelumnya adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai dokumen rencana tahunan SKPD, Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansi menterjemahkan arah kebijakan dan strategi SKPD 5 tahunan yang telah dirumuskan di dalam dokumen Renstra menjadi perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan dengan tetap mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Renja DLH tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026, yang memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah selama 5 tahun serta penjabarannya ke dalam program dan anggaran tahunan. Tujuan DLH yang termuat di dalam dokumen renstra dimaksud adalah mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, dengan sasaran 1) terwujudnya penataan lingkungan hidup, 2) terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, 3) terwujudnya optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah B3.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renja SKPD adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
- 10) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 30);

- 13) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 14) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas LH adalah dokumen perencanaan Dinas untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, khususnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk mewujudkan rencana kerja tahunan yang konsisten, implementatif, dan menjadi tolak ukur penilaian kinerja, serta untuk mencapai harmonisasi perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Bab I PENDAHULUAN
 - a. Latar Belakang
 - b. Landasan Hukum
 - c. Maksud dan Tujuan
 - d. Sistematika Penulisan
2. Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - b. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
 - d. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - e. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
3. Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - a. Telaahan terhadap kebijakan nasional
 - b. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
4. Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
5. Bab V PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas LH Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah TA 2022

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mulai pada tahun 2021 klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah sudah mengacu dan mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Di dalam pelaksanaannya Renja Dinas LH Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 secara umum dapat disimpulkan bahwa keseluruhan target-target yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas LH Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 9 program, 15 kegiatan dan 35 sub kegiatan dengan perincian: 1 program penunjang urusan (7 kegiatan dan 20 sub kegiatan) dan 8 program urusan lingkungan hidup (8 kegiatan dan 15 sub kegiatan).

Sementara itu alokasi anggaran belanja yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp21.580.299.087,- dan target pendapatan daerah yang dibebankan kepada Dinas LH adalah sebesar Rp1.645.000.000 (dari pengelolaan laboratorium LH dan KJP Pengelolaan Sampah pada TPA Regional Solok dan Payakumbuh).

Komponen pada program penunjang urusan umumnya berada pada dan dikelola oleh Sekretariat Dinas. Kegiatan dan sub kegiatan pada program ini pada umumnya bersifat pendukung untuk kelancaran dan optimalnya pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan urusan LH, misalnya seperti penyusunan dokumen perencanaan, penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan logistic/sarana/prasarana/perlengkapan kantor, sumber daya air dan listrik, pemeliharaan sarana/prasarana umum dan lain-lain. Sementara itu untuk 8 program, 8 kegiatan dan 15 sub kegiatan urusan lingkungan hidup terealisasi secara fisik dengan capaian 100% sesuai yang ditargetkan.

Kinerja keuangan pada umumnya juga dapat dicapai dengan baik dengan persentase serapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebesar 94,64% dan pencapaian target pendapatan daerah sebesar 139,12%. Adapun kurangnya realisasi serapan anggaran pada beberapa sub kegiatan hingga mencapai 10% lebih didominasi disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran.

Rincian realisasi kinerja program tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rincian realisasi kinerja program tahun 2021

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Realisasi
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kesesuaian antara dokumen rencana dengan implementasi	%	100	100
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan	%	60	71
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah kab/kota yang telah terdata potensi dan pemanfaatan keanekaragaman hayatinya	Kab. / Kota	19	16
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase cakupan izin lingkungan dan izin PPLH yang dapat dibina dan diawasi	%	50	35,56
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	75	164
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan penghargaan di bidang lingkungan hidup	%	10	6,45
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	%	90	100
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	%	60	63,06

Sementara itu untuk realisasi serapan anggaran per program adalah sebagaimana tabel 2.2 berikut

Tabel 2.2. Serapan anggaran per program

No	Program	Pagu	Realisasi	
			Rp	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.638.457.347	11.170.093.437	95,98

II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	158.882.610	158.727.200	99,90
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.136.573.800	1.067.323.272	93,91
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	72.288.500	71.202.900	98,50
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	89.194.500	88.810.550	99,57
VI	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	867.710.750	834.019.058	96,12
VII	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	192.469.850	188.274.350	97,82
VIII	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	110.095.600	109.977.000	99,89

UPTD PERSAMPAHAN

IX	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5.001.590.750	4.433.856.327	88,65
----	---------------------------------	---------------	---------------	-------

UPTD LABORATORIUM

X	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.313.035.380	2.302.375.731	99,54
	Total Anggaran	21.580.299.087	20.424.659.825	94,64

Pada tahun 2021 keseluruhan dari 9 program, 15 kegiatan dan 35 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh DLH realisasi fisiknya mencapai 100% dan untuk keuangan, realisasi secara keseluruhan adalah 94,64%. Sungguhpun demikian terdapat 4 (empat) sub kegiatan yang serapan anggarannya kurang dari 90%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan realisasi keuangan 69,70%;
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan realisasi keuangan 88,64%;
3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan realisasi keuangan 72,68%;
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional, dengan realisasi keuangan 52,67%.

Dari keempat sub kegiatan tersebut di atas, 3 diantaranya merupakan sub kegiatan yang bersifat penunjang dan 1 sub kegiatan urusan lingkungan hidup, khususnya pada program pengelolaan persampahan regional. Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencerminkan rendahnya realisasi fisik. Capaian fisik sub kegiatan ini berhasil dicapai 100%. Adapun sisa anggaran adalah karena harga tanah yang disepakati hanya lebih kurang setengah daripada harga yang direncanakan dan ditetapkan di dalam dokumen DPA.

Secara detail, hasil pelaksanaan Renja DLH Tahun anggaran 2021 dan capaian Renstra DLH sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2-3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022.

Tabel. 2.3
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja hasil program dan kegiatan s/d Tahun 2020 (tahun n-3)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) (tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Tahun berjalan (2022)		
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan /tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)					
(2)	(3)	(4)		(5)			(6)			(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11)=(10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN														
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100	%											
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	10	dokumen			9,00	dokumen	9,00	dokumen	100,00	2	11	110	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	5	dokumen			0,00		0,00			1	1	20	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	5	dokumen			0,00		0,00			1	1	20	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA yang disusun	5	dokumen			0,00		0,00			1	1	20	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	5	dokumen			0,00		0,00			1	1	20	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun (LAKIP, LKPJ, LPPD)	15	dokumen			3,00	dokumen	3,00	dokumen	100,00	3	6	40	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	20	dokumen			2,00	dokumen	2,00	dokumen	100,00	4	6	30	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100	%											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	519	orang			89,00	orang	77,00	orang	86,52	89	166	32	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor (Pengelola Keuangan, Pengelola barang milik daerah, pengelola sistem informasi)	143	orang			12,00	bulan	12,00	bulan	100,00	23	23	16	
Administrasi Barang Milik Daerah pada	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100	%											
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kendaraan Dinas/ Operasional yang diamankan	59	unit			10,00	unit	10,00	unit	100,00		10	17	
	Bangunan yang diamankan	8	unit			2,00	unit	2,00	unit	100,00		2	25	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja hasil program dan kegiatan s/d Tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) (tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Tahun berjalan (2022)		
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan /tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11)=(10/4)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %							0	0
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	515 stel			91,00 stel	86,00 stel	94,51	103	189	37
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	ASN DLH yang mengikuti Bimtek	5 orang			5,00 orang	2,00 orang	40,00		2	40
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	35 orang			0,00 orang	0,00 orang	#DIV/0!	7	7	20
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah						#DIV/0!		0	#DIV/0!
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	58 buah					#DIV/0!		0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	51 unit					#DIV/0!	10	10	20
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	88 unit					#DIV/0!	40	40	45
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	54 buah					#DIV/0!	6	6	11
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	24 buah					#DIV/0!	8	8	33
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	106 dokumen					#DIV/0!	40	40	38
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	30 arsip					#DIV/0!	0	0	0
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi/modul yang dikembangkan	18 aplikasi/modul					#DIV/0!	0	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %					#DIV/0!		0	0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Pengadaan Mebel	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan	4 unit					#DIV/0!	0	0	0
	Jumlah Mebel	30 unit					#DIV/0!	0	0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja hasil program dan kegiatan s/d Tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) (tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Tahun berjalan (2022)		
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan /tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11)=(10/4)	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang di adakan	44 unit				#DIV/0!	0	0	0	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	3 paket				#DIV/0!	0	0	0	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					#DIV/0!		0	#DIV/0!	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	380 surat				#DIV/0!	300	300	79	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan air yang dibayarkan	12.246 m3			155,00 kwh	500,00 kwh	322,58	50	550	4
	Jumlah tagihan internet yang di bayarkan	150 mbps			25,00 mbps	150,00 mbps	600,00	150	300	200
	Jumlah tagihan listrik yang di bayarkan	814.000 kwh			85.000 kwh	93.676,00 kwh	110,21	82000	175676	22
	Jumlah tagihan telpon yang di bayarkan	10 rekening			2,00 rekening	2,00 rekening	100,00	2	4	40
Sub Kegiatan 4: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	175 orang				#DIV/0!	25	25	14	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %				#DIV/0!		0	0	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	78 unit			10,00 unit	10,00 unit	100,00	11	21	27
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (komputer, printer, UPS, scanner, internet, LAN)	140 unit			0,00	0,00	#DIV/0!	65	65	46
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	8 unit			2,00 unit	2,00 unit	100,00	0	2	25

Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja hasil program dan kegiatan s/d Tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) (tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Tahun berjalan (2022)		
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan /tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
										(6)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11)=(10/4)	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab (AC)	134 unit					#DIV/0!	25	25	19
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab (Garase, Pagar)	6 unit					#DIV/0!	2	2	33
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kesesuaian antara dokumen rencana dengan implementasi	100 %					#DIV/0!		0	0
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase pemanfaatan dokumen RPPLH dalam penyusunan KLHS						#DIV/0!		0	#DIV/0!
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH yang ditinjau	1 dokumen			0,00	0,00	#DIV/0!	0	0	0
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah kab/kota yang dibina dalam pelaksanaan RPPLH Provinsi dan dokumen perencanaan lingkungan lainnya	76 kab/kota			0,00	0,00	#DIV/0!	0	0	0
	Jumlah sektor yang dievaluasi dalam implementasi RPPLH provinsi	6 sektor			0,00	0,00	#DIV/0!	6	6	100
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase integrasi dokumen KLHS dalam dokumen perencanaan lainnya						#DIV/0!		0	#DIV/0!
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan terhadap pembuatan dan pelaksanaan KLHS RTRW, RDTR, KSP kab/kota	76 kab/kota			0	0	#DIV/0!	0	0	0
	Jumlah KLHS RTRW, RDTR, Kawasan Strategis Provinsi yang disusun dan ditinjau	1 dokumen			0	0	#DIV/0!	0	0	0
	Persentase pelaksanaan KLHS tata ruang	60 %			0	0	#DIV/0!	60	60	100
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun/ditinjau	3 dokumen			1	1	100,00	1	2	67
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen KLHS KRP yang disusun dan/atau ditinjau	1 dokumen			0	0	#DIV/0!	0	0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja hasil program dan kegiatan s/d Tahun 2020 (tahun n-3)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) (tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Tahun berjalan (2022)	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan /tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)				
(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11)=(10/4)			
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan						#DIV/0!		0		#DIV/0!		
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase objek yang dapat dicegah pencemaran dan/atau perusakannya terhadap lingkungan hidup						#DIV/0!		0		#DIV/0!		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Kab/Kota yang dikoordinasi dan disinkronisasi dalam pelaksanaan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	76	kab/kota				#DIV/0!	0	0		0		
	Jumlah media lingkungan yang dipantau	4	media				#DIV/0!	4	4		100		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Kab/Kota yang dikoordinasikan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	76	kab/kota				#DIV/0!	0	0		0		
	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1	laporan				#DIV/0!	1	1		100		
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah laboratorium lingkungan yang dikelola	1	laboratorium		1,00	laboratorium	100,00	0	1		100		
	Jumlah pengadaan peralatan	12	jenis				#DIV/0!	12	12		100		
	Jumlah unit laboratorium yang dioperasikan	1	unit		1,00	laboratorium	100,00	1	2		200		
	Jumlah parameter yang akan diajukan untuk akreditasi dan registrasi	8	parameter		0,00		#DIV/0!	8	8		100		
	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan	2	kali				#DIV/0!	2	2		100		
	Jumlah pengadaan bahan kimia	1	paket		1,00	paket	100,00	1	2		200		
	Jumlah pengadaan suporting	9	jenis		16,00	jenis	100,00	9	25		278		
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dilakukan						#DIV/0!		0		#DIV/0!		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah dokumen kelayakan dan DED rencana pemulihan	1	dokumen		0,00		#DIV/0!	0	0		0		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja hasil program dan kegiatan s/d Tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) (tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Tahun berjalan (2022)	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan /tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11)=(10/4)
	Luas media lingkungan yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk direhabilitasi	1 ha		0,00	0,00	#DIV/0!	0	0	0
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah dokumen rencana pemulihan yang disusun	2 dokumen		0,00	0,00	#DIV/0!	0	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah kab/kota yang telah terdata potensi dan pemanfaatan keanekaragaman hayatinya					#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Luas kawasan keanekaragaman hayati provinsi yang dikelola					#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola	60 hektar		0,00	0,00	#DIV/0!	0	0	0
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas taman kehati lainnya yang dikelola	40 hektar		0,00	0,00	#DIV/0!	0	0	0
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah kawasan taman kehati lainnya yang dikelola	1 kawasan		0,00	0,00	#DIV/0!	1	1	100
	Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	400 orang		0,00	0,00	#DIV/0!	0	0	0
	Jumlah peserta/masyarakat pemeliharaan kawasan yang dibina	150 orang		0,00	0,00	#DIV/0!	150	150	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase cakupan izin lingkungan dan izin PPLH yang dapat dibina dan diawasi					#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase cakupan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemda Provinsi yang dapat dibina dan diawasi					#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang difasilitasi dalam pemenuhan izin lingkungan /persetujuan lingkungan dan/atau izin PPLH/Persetujuan Teknis	18 Usaha dan/atau kegiatan		0,00	0,00	#DIV/0!	0	0	0
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Persentase jumlah PPLH yang mengikuti pengembangan kapasitas dari jumlah PPLH yang ada	100%		0,00	0,00	#DIV/0!	0	0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja hasil program dan kegiatan s/d Tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) (tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Tahun berjalan (2022)		
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan /tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11)=(10/4)	
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup/izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi yang diawasi	21	Usaha dan/atau kegiatan	3,00		2,00	66,67	7	9	43
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah sanksi administratif yang diterbitkan dan/atau dievaluasi sebagai tindak lanjut pengawasan, upaya dan rencana PPLH dan dikordinasikan serta disinkronisasikan dengan instansi terkait	18	sanksi	0,00		0,00	#DIV/0!	0	0	0
	Jumlah Sanksi Administrasi bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan evaluasi	4	sanksi	0,00		0,00	#DIV/0!	4	4	100
	Jumlah Sanksi Administrasi bidang Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh pemerintahan provinsi	2	sanksi	0,00		0,00	#DIV/0!	2	2	100
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase penanganan LB3 Sumatera Barat						#DIV/0!		0	#DIV/0!
Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase timbulan LB3 Sumatera barat yang terkumpul						#DIV/0!		0	#DIV/0!
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah fasilitas pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3	5	kali	0,00		0,00	#DIV/0!	1	1	20
	Jumlah Kab/Kota yang dibina terkait persetujuan teknis pengelolaan limbah B3	95	kab/kota	0,00		0,00	#DIV/0!	19	19	20
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah fasilitas pengelolaan limbah B3 Fasyankes yang dioperasionalkan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah	1	fasilitas	0,00		0,00	#DIV/0!	1	1	100
	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi pembentukan depo pemindahan limbah B3 Fasyankes	8	kab/kota	0,00		0,00	#DIV/0!	0	0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja hasil program dan kegiatan s/d Tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) (tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Tahun berjalan (2022)	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan /tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11)=(10/4)
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup/izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi yang diawasi	21	Usaha dan/atau kegiatan	3,00	2,00	66,67	7	9	43
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase pemenuhan data MHA dan hak MHA yang terkait dengan PPLH					#DIV/0!		0	#DIV/0!
Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah calon MHA yang dilakukan identifikasi, verifikasi dan validasi subjek dan objek Masyarakat Hukum Adat sebagai bagian dari proses pengukuhan					#DIV/0!		0	#DIV/0!
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah calon MHA yang dilakukan pendataan dan penggalian informasi tentang kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	8	Kelompok masyarakat	0,00	0	#DIV/0!	0	0	0
	Jumlah kelompok yang difasilitasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai MHA	1	orang/kelompok	0,00	0	#DIV/0!	1	1	100
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah kelompok MHA yang diberikan penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis atau kegiatan sejenis lainnya					#DIV/0!		0	#DIV/0!
Sub Kegiatan 2: Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah kelompok MHA yang dilakukan pendampingan dalam rangka pemberdayaan / kemitraan / penguatan kelembagaan	4	kelompok	0,00	0	#DIV/0!	0	0	0
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup					#DIV/0!		0	#DIV/0!
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi					#DIV/0!		0	#DIV/0!

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja hasil program dan kegiatan s/d Tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) (tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Tahun berjalan (2022)	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan /tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11)=(10/4)
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi bidang Lingkungan Hidup lembaga kemasyarakatan	8 kali				#DIV/0!	0	0	0
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah instansi yang dibina dalam pengelolaan lingkungan	76 instansi				#DIV/0!	0	0	0
	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam pengelolaan hidup	20 kelompok masyarakat				#DIV/0!	0	0	0
	Jumlah anggota saka kalpataru	100 orang		0,00	0	#DIV/0!	100	100	100
	Jumlah bank sampah yang dibangun	2 paket		0,00	0	#DIV/0!	2	2	100
	Jumlah kab/kota yang dibina dalam pengelolaan sampah	19 kab/kota		12,00	8	66,67	19	27	142
	Jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah	75 kelompok		0,00	0	#DIV/0!	75	75	100
	Jumlah peliputan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup	25 kali		0,00	0	#DIV/0!	25	25	100
	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan lingkungan	90 orang		0,00	0	#DIV/0!	90	90	100
	Jumlah rangkaian acara edukasi dan kampanye lingkungan hidup	2 event		2,00	2	100,00	2	4	200
	Jumlah sarana dan prasarana yang dibantu bagi pemukiman/kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah	5 paket		0,00	0	#DIV/0!	5	5	100
Sub Kegiatan 3: Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup yang dilakukan	30 kali		0,00	0	#DIV/0!	0	0	0
	Jumlah dokumen informasi lingkungan yang disusun	4 dokumen		0,00	0	#DIV/0!	0	0	0
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan penghargaan di bidang lingkungan hidup					#DIV/0!		0	#DIV/0!
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah masyarakat yang diberikan penghargaan lingkungan tingkat provinsi					#DIV/0!		0	#DIV/0!
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah adiwiyata yang dinilai untuk diusulkan ke tingkat nasional	40 sekolah		80,00	75 sekolah	93,75	0	75	188
	Jumlah Kab/Kota yang dinilai untuk penghargaan Adipura	20 kab/kota		0,00	0	#DIV/0!	0	0	0
	Jumlah Kecamatan/Kelurahan yang dinilai untuk Gerakan Sumbar Bersih	28 kec./kel.		0,00	0	#DIV/0!	0	0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja hasil program dan kegiatan s/d Tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) (tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Tahun berjalan (2022)	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan /tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11)=(10/4)
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan					#DIV/0!		0	#DIV/0!
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan sesuai kewenangan dari jumlah pengaduan yang diterima					#DIV/0!		0	#DIV/0!
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Persentase pengaduan yang difasilitasi baik melalui pelimpahan sesuai kewenangan maupun verifikasi lapangan	90 %		0,00	0,00	#DIV/0!	0	0	0
	Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan	3 kasus		3,00 kasus	14,00 kasus	466,67	3	17	567
	Jumlah kasus lingkungan hidup yang difasilitasi penyelesaiannya	9 kasus		11,00 kasus	7,00 kasus	63,64	9	16	178
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat					#DIV/0!		0	#DIV/0!
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase sampah terkelola di TPA/TPST Regional					#DIV/0!		0	#DIV/0!
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah dokumen terkait pengelolaan sampah yang disusun	5 dokumen		1,00 dokumen	1,00 dokumen	100,00	0	1	20
	Dokumen naskah akademis Ranperda yang disusun	1 dokumen		0,00 dokumen	0,00 dokumen	#DIV/0!	1	1	100
	Dokumen masterplan pengelolaa sampah provinsi sumatera barat dan dokumen studi kelayakan penerapan teknologi waste to energy yang disusun	2 dokumen		0,00	0,00	#DIV/0!	2	2	100
Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah TPA/TPST Regional yang dioperasikan/diperlihara	2 TPA		2,00 TPA	2,00 TPA	100,00	0	2	100
	Jumlah TPA sampah regional yang dioperasionalkan	2 TPA		0,00	0,00	#DIV/0!	2	2	100
	Jumlah TPA sampah regional yang dipelihara infrastrukturnya	2 TPA		0,00 TPA	0,00 TPA	#DIV/0!	2	2	100
	Jumlah laporan pemantauan kualitas lingkungan kawasan TPA sampah regional yang dipantau	4 laporan		0,00	0,00	#DIV/0!	4	4	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah kordinasi dan sinkronisasi terkait penyediaan sarana dan prasarana di TPA regional yang dikordinasi dan disinkronkan dalam penyediannya	4 laporan		0,00	0,00	#DIV/0!	0	0	0
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA Regional yang diadakan	4 laporan		0,00	0,00	#DIV/0!	1	1	25

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan pada Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

Adapun kewenangan yang menyertainya adalah menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang dibutuhkan guna membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup, dengan fungsi yang melekat yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Urusan lingkungan hidup berdasarkan Pergub Nomor 78 Tahun 2016 memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKU (Indikator Kinerja Utama). Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat dari IKU berdasarkan cascading yang telah ditetapkan. Capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Renstra 2017 - 2021											
1.	Persentase Kecukupan Instrumen Penataan Lingkungan Di Sumatera Barat	-	-	90	100			93,61	126,59			
2.	Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan			85	100			85	100			
3.	Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan			2	4			2,53	4,04			
4.	Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria			8,2	7			8,8	7,05			
5.	Jumlah orang/kelompok yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan			59	95			43	137			
	Renstra 2021 - 2026											
1.	Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan	-	-	-	75	77	82	-	82	83		
2.	Persentase penurunan beban pencemaran	-	-	-	2,5	2,5	2,5	-	4,48	3		

3.	Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan	-	-	-	0,05	0,05	0,05	-	0,07	0,05		
4.	Persentase penanganan sampah	-	-	-	54	56	58	-	45,24	47		
5.	Persentase pengurangan sampah	-	-	-	15	17	19	-	10,11	12		
6.	Jumlah limbah B3 yang dikelola	-	-	-	237.536	261.290	287.419		251.562	260.000		

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD maupun hasil kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD, untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dan untuk menentukan peluang dan tantangan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Merujuk kepada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2021 – 2026 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026, telah dirumuskan isu strategis berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah:

1. Pencemaran air. Isu ini antara lain dilatarbelakangi oleh meningkatnya pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi (misalnya industri sawit), meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pemukiman, meningkatnya luas lahan, meningkatnya produktivitas perikanan darat dan peternakan aktifitas pembuangan limbah industri dan limbah rumah tangga ke sungai, kurangnya komitmen pemda dalam pengawasan dan kebijakan tata ruang yang buruk.
2. Persampahan dan limbah B3. Isu ini didorong oleh beberapa faktor, seperti peningkatan jumlah penduduk, meningkatnya penggunaan bahan sekali pakai (tidak guna ulang), aktifitas fasyankes, kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku industri, budaya malas, isu sampah tidak menjadi perhatian serius bagi pemerintah, berkembangnya program pengembangan pariwisata, kurangnya kesadaran pemerintah terhadap pengelolaan sampah dan tidak adanya penegakan hukum.
3. Lih fungsi dan kerusakan lahan dan penurunan tutupan hutan. Isu ini berkembang akibat dari beberapa faktor, antara lain akibat aktifitas pertambangan, peningkatan jumlah kebutuhan perumahan, pembukaan lahan baru dari masyarakat untuk perkebunan, investasi ekstraktif, politik ekonomi tidak pro konservasi, industrialisasi skala besar dan kebijakan pemerintah yang mendukung, misal kebijakan pembangunan 1 juta rumah bersubsidi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 masih harus disesuaikan dengan kebutuhan Dinas LH Provinsi Sumatera Barat. Review lengkap terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap konsep rancangan awal RKPD Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

No	RANCANGAN AWAL RKPD (sesuai Renstra)					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				22.290.389.000					41.955.823.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				12.457.459.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				13.536.959.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	50.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	73.500.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Padang	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	2 dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Padang	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	2 dokumen	45.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Padang	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Padang	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 dokumen	5.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Padang	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	1 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Padang	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	1 dokumen	5.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Padang	Dokumen DPA yang disusun	1 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Padang	Dokumen DPA yang disusun	1 dokumen	5.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Padang	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	1 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Padang	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	1 dokumen	5.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Padang	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun (LAKIP, LKPJ, LPPD)	3 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Padang	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun (LAKIP, LKPJ, LPPD)	3 dokumen	5.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Padang	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	4 dokumen	20.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Padang	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	4 dokumen	3.500.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	9.450.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	9.600.000.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	100 pegawai	9.100.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	100 pegawai	9.100.000.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Padang	Jumlah ASN yang mendapatkan honor (Pengelola Keuangan, Pengelola barang milik daerah, pengelola sistem informasi)	30 orang	350.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Padang	Jumlah ASN yang mendapatkan honor (Pengelola Keuangan, Pengelola barang milik daerah, pengelola sistem informasi)	40 orang	500.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	115.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	115.000.000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Padang	Kendaraan Dinas/ Operasional yang diamankan	16 unit	115.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Padang	Kendaraan Dinas/ Operasional yang diamankan	16 unit	115.000.000
	Kota Padang	Bangunan yang diamankan	2 unit			Kota Padang	Bangunan yang diamankan	2 unit	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	93.250.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	102.250.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Padang	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	103 stel	68.250.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Padang	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	103 stel	77.250.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Padang	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	7 orang	25.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Padang	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	7 orang	25.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	305.000.000	Administrasi Umum Perangkat		Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	515.000.000

					Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 bulan	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 bulan	5.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Padang	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 unit	40.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Padang	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15 unit	250.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 unit	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 unit	50.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Padang	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 bulan	30.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Padang	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 bulan	30.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Padang	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4 buah	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Padang	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4 buah	10.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	12 dikumen	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	12 Dokumen	150.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Padang	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	5 arsip	10.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Padang	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	5 arsip	10.000.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Padang	Jumlah aplikasi/modul yang dikembangkan	3 aplikasi/modul	10.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Padang	Jumlah aplikasi/modul yang dikembangkan	3 aplikasi/modul	10.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	520.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	620.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kota Padang	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	1 unit	350.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kota Padang	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	2 unit	450.000.000

Lapangan					Lapangan				
Pengadaan Mebel	Kota Padang	Jumlah Mebel	8 unit	50.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Padang	Jumlah mebel yang diadakan	8 unit	50.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	8 unit	120.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	8 unit	120.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.643.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.970.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	20 surat	20.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	20 surat	20.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang	Jumlah tagihan air yang dibayarkan	2196 meter kubik	223.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang	Jumlah tagihan air yang dibayarkan	2196 meter kubik	250.000.000
		Jumlah tagihan internet yang di bayarkan	mbps				Jumlah tagihan internet yang di bayarkan	mbps	
		Jumlah tagihan listrik yang di bayarkan	132000 kwh				Jumlah tagihan listrik yang di bayarkan	132000 kwh	
		Jumlah tagihan telpon yang di bayarkan	2 rekening				Jumlah tagihan telpon yang di bayarkan	2 rekening	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	36 orang	1.400.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang, Payakumbuh, Solok	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	40 orang	1.700.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	281.209.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	541.209.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	16 unit	141.209.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	16 unit	141.209.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (komputer, printer, UPS, scanner, internet, LAN)	15 unit	35.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (komputer, printer, UPS, scanner, internet, LAN)	16 Unit	75.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Padang	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	2 unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Padang	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	3 unit	100.000.000
emeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Padang	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab (AC)	27 unit	30.000.000	emeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Padang	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab (AC)	27 unit, 2 Unit	75.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Padang	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab (Garase, Pagar)	1 unit	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Padang	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab (Garase, Pagar)	4 unit	150.000.000
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase kesesuaian antara dokumen rencana dengan implementasi	100%	214.286.000	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase kesesuaian antara dokumen rencana dengan implementasi	100%	450.000.000
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		Persentase pemanfaatan dokumen RPPLH dalam penyusunan KLHS	100%	100.000.000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		Persentase pemanfaatan dokumen RPPLH dalam penyusunan KLHS	100%	200.000.000
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi		Jumlah kab/kota yang dibina dalam pelaksanaan RPPLH Provinsi dan dokumen perencanaan lingkungan lainnya	19 Kab/Kota	100.000.000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	19 kab/kota se Sumatera Barat	Jumlah kab/kota yang dibina dalam pelaksanaan RPPLH Provinsi dan dokumen perencanaan lingkungan lainnya	19 kab/kota	200.000.000
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		Persentase integrasi dokumen KLHS dalam dokumen perencanaan lainnya	100%	114.286.000	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		Persentase integrasi dokumen KLHS dalam dokumen perencanaan lainnya	100%	250.000.000
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan terhadap pembuatan dan pelaksanaan KLHS RTRW, RDTR, KSP kab/kota	19 Kab/Kota	114.286.000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	19 kab/kota se Sumatera Barat	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan terhadap pembuatan dan pelaksanaan KLHS RTRW, RDTR, KSP kab/kota	19 kab/kota	250.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN		Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang	60%	1.826.785.000	PROGRAM PENGENDALIAN		Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan	60%	2.690.000.000

DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		dikendalikan			PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase objek yang dapat dicegah pencemaran dan/atau perusakannya terhadap lingkungan hidup	40%	1.751.785.000	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase objek yang dapat dicegah pencemaran dan/atau perusakannya terhadap lingkungan hidup	40%	2.690.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah Kab/Kota yang dikoordinasi dan disinkronisasi dalam pelaksanaan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	19 Kab/Kota	385.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	19 kab/kota	Jumlah Kab/Kota yang dikoordinasi dan disinkronisasi dalam pelaksanaan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	19 kab/kota	540.000.000
					Sub Koordinator Pencemaran				
					Fasilitasi Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik	Kabupaten Agam			
					Pemantauan Kualitas Air Laut, Pesisir, dan Sumber Pencemar	Kabupaten Pasaman Barat			
						Kabupaten Agam			
						Kabupaten Padang			
						Pariaman			
						Kabupaten Pesisir Selatan			
						Kabupaten Kepulauan Mentawai			
						Kota Padang			
						Kota Pariaman			
					Pemantauan Kualitas Air Skala Provinsi	Kabupaten Agam			

dan Sumber Pencemar	
	Kabupaten Dharmasraya
	Kabupaten Mentawai
	Kabupaten 50 Kota
	Kabupaten Padang Pariaman
	Kabupaten Sijunjung
	Kabupaten Solok
	Kabupaten Solok Selatan
	Kabupaten Tanah Datar
	Kota Bukittinggi
	Kota padang Panjang
	Kota Payakumbuh
	Kota Sawahlunto
	Koto Solok
Sub Koordinator Kerusakan	
Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan	
- Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan Lahan Akses Terbuka (LAT)	Kabupaten Sijunjung (3 objek)
- Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan Ekosistem Mangrove	Kabupaten Mentawai (1 objek)
- Pemantauan Kualitas Lahan dan Ekosistem Gambut	Kabupaten Pesisir Selatan (1 objek)

	Kabupaten Agam (1 objek)
	Kabupaten Pasaman Barat (1 objek)
Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	
- Penyusunan Dokumen DED Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	Kabupaten Sijunjung (1 Dokumen DED)
PROPER Daerah	
- PROPER Daerah Kota Padang	Hotel Pangeran
	Hotel Mercure
	SP Hospital
	Tambang SP
	RS Siti Rahmah
	RS Ibnu Sina
- PROPER Daerah Kota Pariaman	Kota Pariaman RSUD Pariaman
- PROPER Daerah Kota Padang Panjang	Kota Padang Panjang RSUD Padang Panjang
- PROPER Daerah Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi RSUD Achmad Muchtar
- PROPER Daerah Kota Payakumbuh	Kota Payakumbuh RSUD Adnaan WD
- PROPER Daerah Kota Solok	Kota Solok RSUD M Natsir
	Kota Solok RSIA Permata Bunda
- PROPER Daerah Kabupaten Agam	Kabupaten Agam RSUD Lubuk Basung

					- PROPER Daerah Kabupaten Tanah Datar - PROPER Daerah Kabupaten Sijunjung	Kabupaten Tanah Datar RSUD M Hanafiah Kabupaten Sijunjung RSUD Sijunjung			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Jumlah Kab/Kota yang dikoordinasikan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	19 Kab/Kota	150.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	19 kabupaten/kota se Sumatera Barat		19 kab/kota	150.000.000
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Kota Padang (UPTD Laboratorium)	Jumlah laborarouim lingkungan yang dikelola	1 laboratorium	1.216.785.000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Kota Padang (UPTD Laboratorium)		1 laboratorium	2.000.000.000
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dilakukan	0,002%	75.000.000	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dilakukan	0,002%	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		Jumlah dokumen kelayakan dan DED rencana pemulihan	1 dokumen	75.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		Jumlah dokumen kelayakan dan DED rencana pemulihan	0 dokumen	-
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Jumlah kab/kota yang telah terdata potensi dan pemanfaatan keanekaragaman hayatinya	19 Kab/Kota	136.052.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Jumlah kab/kota yang telah terdata potensi dan pemanfaatan keanekaragaman hayatinya	19 Kab/Kota	137.000.000
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		Luas kawasan keanekaragaman hayati provinsi yang dikelola	10 ha	136.052.000	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		Luas kawasan keanekaragaman hayati provinsi yang dikelola	10 ha	137.000.000
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan		Luas taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola	15 ha	25.000.000	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kota Solok Universitas Andalas, Kab. Padang Pariaman	Luas taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola	15 Ha	25.000.000

						Kota Sawahlunto			
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya		Luas taman kehati lainnya yang dikelola	10 ha	51.052.000	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Danau Singkarak Danau Maninjau	Luas taman kehati lainnya yang dikelola	10 Ha	52.000.000
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100 orang	60.000.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Danau Singkarak Danau Maninjau	Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100 orang	60.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase cakupan izin lingkungan dan izin PPLH yang dapat dibina dan diawasi	50%	160.714.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase cakupan izin lingkungan dan izin PPLH yang dapat dibina dan diawasi	50%	345.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase cakupan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemda Provinsi yang dapat dibina dan diawasi	70%	160.714.000	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase cakupan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemda Provinsi yang dapat dibina dan diawasi	70%	345.000.000
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang difasilitasi dalam pemenuhan izin lingkungan /persetujuan lingkungan dan/atau izin PPLH/Persetujuan Teknis	4 Usaha dan/atau kegiatan	25.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	19 kab/kota se Sumatera Barat	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang difasilitasi dalam pemenuhan izin lingkungan /persetujuan lingkungan dan/atau izin PPLH/Persetujuan Teknis	12 usaha dan/atau kegiatan	75.000.000
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup		Persentase jumlah PPLH yang mengikuti pengembangan kapasitas dari jumlah PPLH yang ada	100%	35.000.000	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kota Padang	Persentase jumlah PPLH yang mengikuti pengembangan kapasitas dari jumlah PPLH yang ada	100%	65.000.000

Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup/izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi yang diawasi	3 Usaha dan/atau kegiatan	75.000.000	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Kab. Pesisir Selatan Kab. Dharmasraya Kab. Solok Selatan Kab. Solok Kota Sawahlunto Kab. Agam Kota Padang Kota Bukittinggi Kab. Tanah Datar Kab. Padang Pariaman	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup/izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi yang diawasi	10 Usaha dan/atau kegiatan	115.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah sanksi administratif yang diterbitkan dan/atau dievaluasi sebagai tindak lanjut pengawasan, upaya dan rencana PPLH dan dikoordinasikan serta disinkronisasikan dengan instansi terkait	4 sanksi	25.714.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Kab. Pesisir Selatan Kab. Dharmasraya Kab. Solok Selatan Kab. Solok Kota Sawahlunto Kab. Agam Kota Padang Kota Bukittinggi Kab. Tanah Datar Kab. Padang Pariaman	Jumlah sanksi administratif yang diterbitkan dan/atau dievaluasi sebagai tindak lanjut pengawasan, upaya dan rencana PPLH dan dikoordinasikan serta disinkronisasikan dengan instansi terkait	10 sanksi	90.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase penanganan LB3 Sumatera Barat	100%	2.871.427.000	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Persentase penanganan LB3 Sumatera Barat	100%	16.196.864.000
Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase timbulan LB3 Sumatera barat yang terkumpul	70%	2.871.427.000	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase timbulan LB3 Sumatera barat yang terkumpul	70%	16.196.864.000

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah fasilitas pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3	1 kali	80.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	19 kab/kota se Sumatera Barat	Jumlah fasilitas pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3	1 kali	150.000.000
	Jumlah Kab/Kota yang dibina terkait persetujuan teknis pengelolaan limbah B3	19 kab/kota				Jumlah Kab/Kota yang dibina terkait persetujuan teknis pengelolaan limbah B3	19 kab/kota	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah fasilitas pengelolaan limbah B3 Fasyankes yang dioperasikan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah	1 fasilitas	2.791.427.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Kota Padang	Jumlah fasilitas pengelolaan limbah B3 Fasyankes yang dioperasikan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah	1 fasilitas	16.046.864.000
	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi pembentukan depo pemindahan limbah B3 Fasyankes	2 kab/kota			Kab. Pesisir Selatan dan Kab. Dharmasraya	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi pembentukan depo pemindahan limbah B3 Fasyankes	2 kab/kota	
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase pemenuhan data MHA dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	100%	49.179.000	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		Persentase pemenuhan data MHA dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	100%	300.000.000
Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait	Jumlah calon MHA yang dilakukan identifikasi, verifikasi dan validasi subjek dan objek Masyarakat Hukum Adat	3 kelompok masyarakat	34.179.000	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan		Jumlah calon MHA yang dilakukan identifikasi, verifikasi dan validasi subjek dan objek Masyarakat Hukum Adat sebagai bagian dari proses pengakuan	3 kelompok masyarakat	150.000.000

dengan PPLH		sebagai bagian dari proses pengukuhan			Hak MHA yang terkait dengan PPLH				
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH		Jumlah calon MHA yang dilakukan pendataan dan penggalian informasi tentang kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	2 kelompok masyarakat	34.179.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kab. Dharmasraya, Kab. Sijunjung, Kab. Solok Selatan	Jumlah calon MHA yang dilakukan pendataan dan penggalian informasi tentang kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	3 kelompok masyarakat	150.000.000
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Jumlah kelompok MHA yang diberikan penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis atau kegiatan sejenis lainnya	3 kelompok masyarakat	15.000.000	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Jumlah kelompok MHA yang diberikan penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis atau kegiatan sejenis lainnya	3 kelompok masyarakat	150.000.000
Sub Kegiatan 2: Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH		Jumlah kelompok MHA yang dilakukan pendampingan dalam rangka pemberdayaan / kemitraan / penguatan kelembagaan	2 kelompok masyarakat	15.000.000	Sub Kegiatan 2: Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kab. Kepulauan Mentawai		5 kelompok masyarakat	150.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK		Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	75%	321.428.000	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN		Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	75%	1.350.000.000

MASYARAKAT					HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	10 lembaga	321.428.000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	10 lembaga	1.350.000.000
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi bidang Lingkungan Hidup lembaga kemasyarakatan	2 kali	75.000.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi bidang Lingkungan Hidup lembaga kemasyarakatan	0%	-
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah instansi yang dibina dalam pengelolaan lingkungan	19 instansi	150.000.000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Padang Pariaman Kab. Tanah Datar Kab. Agam Kota Bukittinggi Kab. Limapuluh Kota Kab. Pasaman Kab. Pasaman Barat Kab. Solok Kab. Solok Selatan Kota Sawahlunto Kab. Sijunjung Kab. Dharmasraya Kab. Pesisir Selatan Kab. Kep. Mentawai Kota Sawahlunto	Jumlah instansi yang dibina dalam pengelolaan lingkungan	16 instansi	450.000.000

						Kota Payakumbuh			
		Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam pengelolaan hidup	5 kelompok masyarakat			Penguohan Saka Kalpataru: Kota Pariaman Kota Bukittinggi Kota Sawahlunto Kota Payakumbuh Kab. Limapuluh Kota	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam pengelolaan hidup	10 kelompok masyarakat	
Sub Kegiatan 3: Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup yang dilakukan	6 Kali	96.428.000	Sub Kegiatan 3: Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Padang Bukittinggi Kota Pariaman Kota Sawahlunto Kab. Limapuluh Kota Kab. Tanah Datar	Jumlah penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup yang dilakukan	6 kali	900.000.000
		Jumlah dokumen informasi lingkungan yang disusun	1 dokumen		Padang	Jumlah dokumen informasi lingkungan yang disusun	1 dokumen		
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan penghargaan di bidang lingkungan hidup	10%	101.275.000	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan penghargaan di bidang lingkungan hidup	10%	800.000.000

Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah masyarakat yang diberikan penghargaan lingkungan tingkat provinsi	11 penghargaan	101.275.000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah masyarakat yang diberikan penghargaan lingkungan tingkat provinsi	11 penghargaan	800.000.000
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah sekolah adiwiyata yang dinilai untuk diusulkan ke tingkat nasional	10 sekolah	101.275.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	19 Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah adiwiyata yang dinilai untuk diusulkan ke tingkat nasional	45 sekolah	800.000.000
		Jumlah Kab/Kota yang dinilai untuk penghargaan Adipura	5 Kab/kota				Jumlah Kab/Kota yang dinilai untuk penghargaan Adipura	0 kab/kota	
		Jumlah Kecamatan/Kelurahan yang dinilai untuk Gerakan Sumbar Bersih	7 Kecamatan/ kelurahan				Jumlah Kecamatan/Kelurahan yang dinilai untuk Gerakan Sumbar Bersih	0 kecamatan/kelurahan	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	90%	107.143.000	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	90%	250.000.000
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		Persentase pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan sesuai kewenangan dari jumlah pengaduan yang diterima	100%	107.143.000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		Persentase pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan sesuai kewenangan dari jumlah pengaduan yang diterima	100%	250.000.000
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi		Persentase pengaduan yang difasilitasi baik melalui pelimpahan sesuai kewenangan maupun verifikasi lapangan	90%	107.143.000	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	19 kab/kota		100%	250.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	65%	4.044.641.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	65%	5.900.000.000
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Persentase sampah terkelola di TPA/TPST Regional	100%	4.044.641.000	Penanganan Sampah di TPA/TPST		Persentase sampah terkelola di TPA/TPST Regional	100%	5.900.000.000

					Regional				
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional		Jumlah dokumen terkait pengelolaan sampah yang disusun	1 dokumen	500.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Padang Kota Solok		2 dokumen (Perda dan kajian kelayakan bioteknologi)	850.000.000
Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Kota Payakumbuh, Kota Solok	Jumlah TPA/TPST Regional yang dioperasikan/diperlihara	2 TPA	3.500.000.000	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Kota Payakumbuh, Kota Solok	Jumlah TPA/TPST Regional yang dioperasikan/diperlihara	2 TPA	5.000.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Jumlah kordinasi dan sinkronisasi terkait penyediaan sarana dan prasarana di TPA regional yang dikoordinasi dan disinkronkan dalam penyediaannya	1 laporan	44.641.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Sumatera Barat		1 laporan	50.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 secara umum telah mengakomodir program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kab/Kota, melalui pelaksanaan forum perangkat daerah, sebagaimana tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5. Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Implementasi insentif fiskal	Kab/kota se Sumatera Barat	Jumlah kebijakan yang dihasilkan	1 kebijakan	Untuk menyikapi keterbatasan penganggaran pada Dinas LH Kab/kota se Sumatera Barat. Catatan: Usulan berupa kebijakan daerah berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran sehingga bukan merupakan kewenangan dari DLH
2.	Penambahan sarana/prasarana persampahan di Kab. Padang Pariaman	Kab. Padang Pariaman	Jumlah paket sarana / prasarana	1 paket	Keterbatasan penganggaran pada APBD Kab. Padang Pariaman. Catatan: penyediaan sarana/prasarana persampahan merupakan kewenangan kabupaten/kota. Usulan dapat ditampung melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK)
3.	Pembangunan model percontohan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dilengkapi dengan sarana prasarana pengelolaan sampah	Nagari sekitar Danau di Kab. Tanah Datar	Jumlah model percontohan yang dibangun	1 paket	Keterbatasan penganggaran pada APBD Kab. Tanah Datar, Catatan: Secara prinsip usulan dapat ditampung, hanya saja di tahun 2023 direncanakan di Kab. Agam.
4.	Pembinaan dan penilaian Adipura di Kab. Tanah Datar	Kab. Tanah Datar	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan Adipura	12 kab/kota	Belum terakomodir dalam Renja DLH 2023. Catatan: USulan spesifik berkaitan dengan pembinaan Adipura tergantung kepada kebijakan pelaksanaan program Adipura oleh KLHK. Namun demikian secara umum pembinaan pengelolaan persampahan sudah tertampung di dalam perencanaan 2023.

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Terdapat 7 Agenda Pembangunan yang termuat di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dari ketujuh agenda pembangunan nasional tersebut di atas, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari misi-misi Presiden, maka pembangunan daerah bidang lingkungan hidup sangat terkait erat dengan agenda pembangunan nasional keenam, yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembangunan lingkungan hidup di daerah, yang mana untuk tahun 2023 dituangkan perencanaannya di dalam dokumen renja ini, adalah dimaksudkan untuk berkontribusi mencapai prioritas nasional ini.

Lebih lanjut dapat dijabarkan bahwa Arah kebijakan untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdiri dari: (a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; (b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan (c) Pembangunan Rendah Karbon. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dilakukan dengan mengintegrasikan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

Selanjutnya peningkatan kualitas lingkungan hidup ini ditetapkan sebagai salah satu sasaran di dalam dokumen RPJMN 2020-2024, dengan indikator utama IKLH, yang mana indikator ini juga digunakan di dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2022-2026.

Di dalam rancangan Renja Dinas LH 2023, untuk telah ditetapkan beberapa program dan kegiatan yang akan sangat menunjang pencapaian sasaran nasional, maupun sasaran strategis daerah, meliputi:

- a. Program perencanaan lingkungan hidup;
- b. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati);
- d. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);

- e. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- f. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
- g. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
- h. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
- i. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup;
- j. Program pengelolaan persampahan

Selain melalui 10 (sepuluh) program strategis di atas, Dinas Lingkungan Hidup dalam pencapaian sasaran tersebut di atas juga didukung oleh program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan

Dalam rangka merespon dan menjawab isu dan permasalahan dalam urusan lingkungan hidup, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Dinas LH Tahun 2022 – 2026 sesuai dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah:

1. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas; dan
2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani.

Sasaran

Sasaran merupakan tujuan yang akan dicapai dan bagian penting dalam Rencana Strategis Program dan Kegiatan Dinas LH Propinsi Sumatera Barat. Adapun sasaran yang ingin dicapai berikut dengan indikator kinerjanya adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	77,43	77,95	78,41	78,81	79,25
		Terwujudnya penataan lingkungan hidup	persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan	77	82	93	96	99
		Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	persentase penurunan beban pencemaran	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
			persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Terwujudnya Optimalisasi Pengolahan Sampah dan Limbah B3	persentase penanganan sampah	56	58	60	62	64
			persentase pengurangan sampah	17	19	21	23	25
			jumlah limbah B3 yang dikelola (ton/tahun)	261.290	287.419	316.160	347.776	382.554
2.	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	78	78,2	78,4	78,6	78,8
		Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat kepuasan terhadap layanan Umum	86%	87%	88%	90%	93%
			Tingkat kepuasan terhadap layanan Kepegawaian	90%	91%	93%	93%	94%
			Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Aset	91%	92%	94%	96%	96%

3.3 Program dan Kegiatan

Tahun 2023 merupakan tahun kedua dari periode RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan Renstra DLH Tahun 2021 – 2026. Pada tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat berencana menjalankan 11 program sebagaimana telah direncanakan di dalam dokumen RPJMD dan Renstra PD 2021-2026, yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Penetapan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 tersebut selain mengacu pada dokumen RPJMD/Renstra, juga didasarkan atas dinamika permasalahan lingkungan hidup aktual serta juga mengacu kepada kebijakan nasional, dalam hal ini KLHK.

Secara ringkas, untuk tahun 2023 terdapat 11 program (1 program penunjang urusan, 10 program urusan), 21 kegiatan (8 kegiatan penunjang urusan, 13 kegiatan urusan) dan 56 sub kegiatan (31 sub kegiatan penunjang urusan, 25 sub kegiatan urusan). Uraian rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024 dapat terlihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024

Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				22.290.389.000				22.838.231.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				12.457.459.000				12.763.633.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah		85%	50.000.000			85%	57.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	Kota Padang	2 dokumen	5.000.000			2 dokumen	7.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	Kota Padang	1 dokumen	5.000.000			1 dokumen	5.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	Kota Padang	1 dokumen	5.000.000			1 dokumen	5.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA yang disusun	Kota Padang	1 dokumen	5.000.000			1 dokumen	5.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	Kota Padang	1 dokumen	5.000.000			1 dokumen	5.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun (LAKIP, LKPJ, LPPD)	Kota Padang	3 dokumen	5.000.000			3 dokumen	5.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	Kota Padang	4 dokumen	20.000.000			4 dokumen	25.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan		100%	9.450.000.000			100%	9.550.000.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Kota Padang	100 pegawai	9.100.000.000			110 pegawai	9.200.000.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor (Pengelola Keuangan, Pengelola barang milik daerah, pengelola sistem informasi)	Kota Padang	30 orang	350.000.000			30 orang	350.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah		100%	115.000.000			100%	115.000.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kendaraan Dinas/ Operasional yang diamankan	Kota Padang	16 unit	115.000.000			16 unit	115.000.000

		Bangunan yang diamankan	Kota Padang	2 unit			2 unit	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	93.250.000		100%	93.250.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kota Padang	103 stel	68.250.000		103 stel	68.250.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	Kota Padang	7 orang	25.000.000		7 orang	25.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	305.000.000		100%	405.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Padang	12 bulan	5.000.000		12 bulan	5.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Padang	8 unit	40.000.000		8 unit	40.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Padang	12 unit	50.000.000		12 unit	100.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kota Padang	12 bulan	30.000.000		12 bulan	30.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kota Padang	4 buah	10.000.000		4 buah	10.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Kota Padang	12 dokumen	150.000.000		12 dokumen	200.000.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	Kota Padang	5 arsip	10.000.000		5 arsip	10.000.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi/modul yang dikembangkan	Kota Padang	3 aplikasi/modul	10.000.000		3 aplikasi/modul	10.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100%	520.000.000		100%	225.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	Kota Padang	1 unit	350.000.000		1 unit	50.000.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Kota Padang	8 unit	50.000.000		8 unit	75.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang di adakan	Kota Padang	8 unit	120.000.000		8 unit	100.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1.643.000.000		100%	1.805.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	Kota Padang	20 surat	20.000.000		20 surat	20.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan air yang dibayarkan	Kota Padang	2196 meter kubik	223.000.000		2500 meter kubik	285.000.000

		Jumlah tagihan internet yang di bayarkan		mbps				
		Jumlah tagihan listrik yang di bayarkan		132000 kwh			150000 kwh	
		Jumlah tagihan telpon yang di bayarkan		2 rekening			2 rekening	
	Sub Kegiatan 4: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Kota Padang	36 orang	1.400.000.000		38 orang	1.500.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik		100%	281.209.000		100%	513.383.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Kota Padang	16 unit	141.209.000		17 unit	200.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (komputer, printer, UPS, scanner, internet, LAN)	Kota Padang	15 unit	35.000.000		20 unit	50.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	Kota Padang	2 unit	50.000.000		2 unit	100.000.000
	emeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab (AC)	Kota Padang	27 unit	30.000.000		28 unit	33.383.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab (Garase, Pagar)	Kota Padang	1 unit	25.000.000		1 unit	130.000.000
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kesesuaian antara dokumen rencana dengan implementasi		100%	214.286.000		100%	219.552.000
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase pemanfaatan dokumen RPPLH dalam penyusunan KLHS		100%	100.000.000		100%	100.000.000
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah kab/kota yang dibina dalam pelaksanaan RPPLH Provinsi dan dokumen perencanaan lingkungan lainnya		19 Kab/Kota	100.000.000		19 Kab/Kota	100.000.000
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase integrasi dokumen KLHS dalam dokumen perencanaan lainnya		100%	114.286.000		100%	119.552.000
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan terhadap pembuatan dan pelaksanaan KLHS RTRW, RDTR, KSP kab/kota		19 Kab/Kota	114.286.000		19 Kab/Kota	69.552.000
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun /ditinjau		0	-		1 dokumen	25.000.000
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen KLHS KRP yang disusun dan/atau ditinjau		0	-		1 dokumen	25.000.000

	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan		60%	1.826.785.000			60%	1.871.683.000
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase objek yang dapat dicegah pencemaran dan/atau perusakannya terhadap lingkungan hidup		40%	1.751.785.000			40%	1.771.683.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Kab/Kota yang dikoordinasi dan disinkronisasi dalam pelaksanaan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		19 Kab/Kota	385.000.000			19 Kab/Kota	415.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Kab/Kota yang dikoordinasikan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		19 Kab/Kota	150.000.000			19 Kab/Kota	140.000.000
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah laboraroiium lingkungan yang dikelola	Kota Padang (UPTD Laboratorium)	1 laboratorium	1.216.785.000			1 laboratorium	1.216.683.000
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dilakukan		0,002%	75.000.000			0,002%	100.000.000
	Luas media lingkungan yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk direhabilitasi	Jumlah dokumen kelayakan dan DED rencana pemulihan		12 hektar	75.000.000			12 hektar	100.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah kab/kota yang telah terdata potensi dan pemanfaatan keanekaragaman hayatinya		19 Kab/Kota	136.052.000			19 Kab/Kota	139.396.000
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Luas kawasan keanekaragaman hayati provinsi yang dikelola		10 ha	136.052.000			10 ha	139.396.000
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola		15 ha	25.000.000			15 ha	25.000.000
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas taman kehati lainnya yang dikelola		10 ha	51.052.000			10 ha	54.396.000
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		100 orang	60.000.000			100 orang	60.000.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase cakupan izin lingkungan dan izin PPLH yang dapat dibina dan diawasi		50%	160.714.000			50%	164.664.000

	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase cakupan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemda Provinsi yang dapat dibina dan diawasi		70%	160.714.000			70%	164.664.000
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang difasilitasi dalam pemenuhan izin lingkungan /persetujuan lingkungan dan/atau izin PPLH/Persetujuan Teknis		4 Usaha dan/atau kegiatan	25.000.000			5 Usaha dan/atau kegiatan	30.000.000
	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Persentase jumlah PPLH yang mengikuti pengembangan kapasitas dari jumlah PPLH yang ada		100%	35.000.000				
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup/izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi yang diawasi		3 Usaha dan/atau kegiatan	75.000.000			4 Usaha dan/atau kegiatan	85.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah sanksi administratif yang diterbitkan dan/atau dievaluasisebagai tindak lanjut pengawasan, upaya dan rencana PPLH dan dikoordinasikan serta disinkronisasikan dengan instansi terkait		4 sanksi	25.714.000			6 sanksi	49.664.000
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase penanganan LB3 Sumatera Barat		100%	2.871.427.000			100%	2.942.000.000
	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase timbulan LB3 Sumatera barat yang terkumpul		70%	2.871.427.000			70%	2.942.000.000
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah fasilitas pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3		1 kali	80.000.000			1 kali	80.000.000
		Jumlah Kab/Kota yang dibina terkait persetujuan teknis pengelolaan limbah B3		19 kab/kota				19 kab/kota	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah fasilitas pengelolaan limbah B3 Fasyankes yang dioperasikan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah		1 fasilitas	2.791.427.000			1 fasilitas	2.862.000.000
		Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi pembentukan depo pemindahan limbah B3 Fasyankes		2 kab/kota				2 kab/kota	
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase pemenuhan data MHA dan hak MHA yang terkait dengan PPLH		100%	49.179.000			100%	50.387.000

	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah calon MHA yang dilakukan identifikasi, verifikasi dan validasi subjek dan objek Masyarakat Hukum Adat sebagai bagian dari proses pengukuhan		3 kelompok masyarakat	34.179.000			3 kelompok masyarakat	35.387.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah calon MHA yang dilakukan pendataan dan penggalian informasi tentang kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH		2 kelompok masyarakat	34.179.000			2 kelompok masyarakat	35.387.000
	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah kelompok MHA yang diberikan penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis atau kegiatan sejenis lainnya		3 kelompok masyarakat	15.000.000			3 kelompok masyarakat	15.000.000
	Sub Kegiatan 2: Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah kelompok MHA yang dilakukan pendampingan dalam rangka pemberdayaan / kemitraan / penguatan kelembagaan		2 kelompok masyarakat	15.000.000			1 kelompok masyarakat	15.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup		75%	321.428.000			75%	329.328.000
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		10 lembaga	321.428.000			10 lembaga	329.328.000
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi bidang Lingkungan Hidup lembaga kemasyarakatan		2 kali	75.000.000			2 kali	77.000.000
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah instansi yang dibina dalam pengelolaan lingkungan		19 instansi	150.000.000			19 instansi	153.000.000
		Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam pengelolaan hidup		5 kelompok masyarakat				5 kelompok masyarakat	
	Sub Kegiatan 3: Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup yang dilakukan		6 Kali	96.428.000			7 Kali	99.328.000
		Jumlah dokumen informasi lingkungan yang disusun		1 dokumen				1 dokumen	
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan penghargaan di bidang lingkungan hidup		10%	101.275.000			10%	103.764.000

	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah masyarakat yang diberikan penghargaan lingkungan tingkat provinsi		11 penghargaan	101.275.000			11 penghargaan	103.764.000
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah adiwiyata yang dinilai untuk diusulkan ke tingkat nasional		10 sekolah	101.275.000			10 sekolah	103.764.000
		Jumlah Kab/Kota yang dinilai untuk penghargaan Adipura		5 Kab/kota				5 Kab/kota	
		Jumlah Kecamatan/Kelurahan yang dinilai untuk Gerakan Sumbar Bersih		7 Kecamatan/kelurahan				7 Kecamatan/kelurahan	
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan		90%	107.143.000			90%	109.776.000
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan sesuai kewenangan dari jumlah pengaduan yang diterima		100%	107.143.000			100%	109.776.000
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Persentase pengaduan yang difasilitasi baik melalui pelimpahan sesuai kewenangan maupun verifikasi lapangan	19 Kab/Kota	90%	107.143.000			90%	109.776.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat		65%	4.044.641.000			65%	4.144.048.000
	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase sampah terkelola di TPA/TPST Regional		100%	4.044.641.000			100%	4.144.048.000
	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah dokumen terkait pengelolaan sampah yang disusun		1 dokumen	500.000.000				
	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah TPA/TPST Regional yang dioperasikan/diperlihara	Kota Payakumbuh, Kota Solok	2 TPA	3.500.000.000			2 TPA	4.100.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah kordinasi dan sinkronisasi terkait penyediaan sarana dan prasarana di TPA regional yang dikoordinasi dan disinkronkan dalam penyediaannya		1 laporan	44.641.000			1 laporan	44.048.000

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan dokumen Renstra, sebagaimana telah diuraikan juga di dalam tabel 2.4, DLH telah merencanakan kebutuhan anggaran sebesar Rp22.290.389.000, terdiri atas 1 program penunjang urusan dan 10 program urusan. Melihat dinamika dan perkembangan kondisi lingkungan hidup serta dengan memperhatikan kondisi-kondisi teraktual yang mempengaruhi besarnya anggaran pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan, anggaran sebesar tersebut masih jauh dari kata cukup. Namun sungguhpun demikian, untuk menjaga konsistensi antara dokumen RPJMD, Renstra dengan Renja ini, maka hingga ditetapkannya RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023, rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan DLH tahun 2023 tetap mengikuti yang telah direncanakan sebelumnya di dalam dokumen Renstra, sebagaimana tabel 4.1 berikut:

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					17,518,963,000				17,491,736,000	
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					12,457,459,000				12,728,633,000	
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					50,000,000				57,000,000	
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen 2 Dokumen		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,000,000
2	11	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen 1 Dokumen		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000
2	11	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen 1 Dokumen		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA yang disusun Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen 1 Dokumen		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000
2	11	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah dokumen perubahan DPA yang disusun	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen 1 Dokumen		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000
2	11	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun (LAKIP, LKPJ, LPPD) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dokumen 3 Laporan		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 11 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Dokumen 4 Laporan		20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000	
2 11 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							9,450,000,000					9,550,000,000	
2 11 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 orang 0 Orang/ Bulan		9,100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,200,000,000	
2 11 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan honor (Pengelola Keuangan, Pengelola barang milik daerah, pengelola sistem informasi)		Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 orang		350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			350,000,000	
2 11 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							115,000,000					115,000,000	
2 11 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Bangunan yang diamankan Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Kendaraan Dinas/ Operasional yang diamankan				2 unit 0 Dokumen 16 kendaraan		115,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			115,000,000	
2 11 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							93,250,000					93,250,000	
2 11 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya				0 Paket 103 stel		68,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			68,250,000	
2 11 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 orang 0 Orang		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000	
2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							305,000,000					405,000,000	
2 11 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 buah 0 Paket		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000	

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP					Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023										
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
					Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
2	11 03 1.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan Jumlah Kab/Kota yang dikoordinasikan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	19 kabupaten/kota		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				140,000,000	
2	11 03 1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup							75,000,000					100,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11 03 1.03 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah dokumen fisik pemulihan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen 0 Dokumen		75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	
2	11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)							136,052,000				139,396,000	
2	11 04 1.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi							136,052,000				139,396,000	
2	11 04 1.01 02	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi		Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 ha 0 Ha		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000	
2	11 04 1.01 05	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	Luas taman kehati lainnya yang dikelola Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi		Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 ha 0 Ha		51,052,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			54,396,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11 04 1.01 06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Orang 100 Orang		60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,000,000	
2	11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)							2,871,427,000			2,942,000,000		
2	11 05 1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							2,871,427,000			2,942,000,000		
2	11 05 1.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah fasilitas pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3 Jumlah Kab/kota yang dibina terkait persetujuan teknis pengelolaan limbah B3		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan,		1 Kali 19 Kab/Kota	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			80,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023														
Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP														
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Painan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Lubuk Sikaping, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
2	11 05 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah fasilitas pengelolaan limbah B3 fasyankes yang dioperasionalkan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi pembentukan depo pemindahan limbah B3 fasyankes		Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Fasilitas 2 Kab/Kota		2,791,427,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,862,000,000
2	11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							160,714,000					164,664,000
2	11 06 1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi							160,714,000					164,664,000
2	11 06 1.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Dokumen		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP					Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023											
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja		Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
						Semua Kelurahan Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
2	11 06 1.01 02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD Persentase jumlah PPLH yang mengikuti pengembangan kapasitas dari jumlah PPLH yang ada		Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Orang 100 %		35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11 06 1.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah usaha kegiatan yang izin lingkungan hidup/izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi yang diawasi		Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 laporan 0 Laporan 3 usaha kegiatan		75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			85,000,000	
2	11 06 1.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah sanksi administratif yang diterbitkan dan/atau dievaluasi sebagai tindak lanjut pengawasan, upaya dan rencana PPLH dan dikoordinasikan serta disinkronisasikan dengan instansi terkait		Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Dokumen 4 sanksi		25,714,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			49,664,000	
2	11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH							49,179,000				50,387,000	
2	11 07 1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH							34,179,000				35,387,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11 07 1.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah calon MHA yang dilakukan pendataan dan penggalan informasi tentang kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH		Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kelompok masyarakat 0 Dokumen		34,179,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,387,000	
2	11 07 1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH							15,000,000				15,000,000	
2	11 07 1.02 01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Jumlah Kelompok MHA yang dilakukan pendampingan dalam rangka pemberdayaan/kemitraan/penguatan kelembagaan		Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Dokumen 2 kelompok masyarakat		15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000	
2	11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							321,428,000				329,328,000	
2	11 08 1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi							321,428,000				329,328,000	
2	11 08 1.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH jumlah pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi bidang lingkungan hidup lembaga kemasyarakatan		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Lembaga 6 kali		75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			77,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11 08 1.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	jumlah instansi yang dibina dalam pengelolaan lingkungan hidup Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam pengelolaan LH Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19 daerah 5 kelompok masyarakat 0 Dokumen		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			153,000,000	
2	11 08 1.01 03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen informasi lingkungan yang disusun Jumlah penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup yang dilakukan				1 dokumen 6 kali		96,428,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			99,328,000	
2	11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							101,275,000				153,000,000	
2	11 09 1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi							101,275,000				153,000,000	
2	11 09 1.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	jumlah instansi yang dibina dalam pengelolaan lingkungan jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam pengelolaan lingkungan hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19 instansi 5 kelompok masyarakat 0 Entitas		101,275,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			153,000,000	
2	11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP							107,143,000				109,776,000	
2	11 10 1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi							107,143,000				109,776,000	
2	11 10 1.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH		Kab. Lima Puluh Kota,		0 Dokumen 90 %		107,143,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			109,776,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023																
Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
						Semua Kelurahan Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
2	11	11								490,000,000				0		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	11	1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional					490,000,000				0	
2	11	11	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan Jumlah Perda yang dibuat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Dokumen 1 Perda	490,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
TOTAL									17,518,963,000				17,491,736,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0001 UPTD Persampahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2																	
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	11									3,554,641,000						50,000,000	
2	11	11								3,554,641,000						50,000,000	
2	11	11	1.01							3,554,641,000						50,000,000	
					Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional												
2	11	11	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan		Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Dokumen 1 Dokumen	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
2	11	11	1.01	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik Jumlah laporan pemantauan kualitas lingkungan kawasan TPA Sampah Regional yang dipantau Jumlah TPA Sampah Regional yang dioperasikan Jumlah TPA Sampah Regional yang dipelihara infrastrukturnya		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Unit 4 laporan RKL RPL 2 TPA 2 TPA	3,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
2	11	11	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen	44,641,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000	
TOTAL										3,554,641,000						50,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Lingkungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP														
2	11	03	1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup													
2	11	03	1.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi		Jumlah laboratorium lingkungan yang dikelola				1 laboratorium	1,216,785,000					3,000,000,000
TOTAL												1,216,785,000				3,000,000,000	

Bab V PENUTUP

Renja DLH sebagai pedoman rencana kerja merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas untuk mendukung terwujudnya misi pemerintah daerah. Untuk tercapainya hasil seperti yang direncanakan dalam rencana kerja, diperlukan komitmen dan dukungan dari keseluruhan sumber daya manusia baik itu unsur pimpinan maupun staf yang ada, sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana kegiatan pada bidang-bidang, UPTD dan sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan pembangunan lingkungan hidup 2023 dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku.
2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat berkewajiban untuk melaksanakan RENJA OPD ini sesuai dengan yang termuat di dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat.
3. Dinas Lingkungan Hidup berkewajiban menjamin konsistensi Renja 2023 dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 dan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026.

Akhir kata, semoga Renja DLH Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 ini dapat dipedomani seutuhnya dan diimplementasikan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023.